



Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

PONTIANAK - Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2013 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Kalbar, Cornelis di Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Kamis (21/8).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar Didi Budi Satrio mengatakan hal yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan adalah masih terdapatnya informasi yang belum secara lengkap diungkapkan

mengenai lokasi, luas, serta status tanah untuk gedung dan bangunan. Tetapi tidak secara material mempengaruhi penyajian aset tetap gedung dan bangun pada laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2013.

Menurut Didi, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan penyusunan laporan keuangan itu sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Semuanya diungkapkan secara memadai. Tidak terdapat unsur ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur sistem pengendalian intern yakni

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta pemantauan.

"Necara Pemprov Kalbar per 31 Desember 2013 menyajikan total aset sebesar Rp4,85 triliun, kewajiban sebesar Rp106,73 miliar, dan ekuitas sebesar Rp4,74 triliun," kata Didi, kemarin.

Didi menjelaskan laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 menyajikan APBD sebesar Rp3,31 triliun dan realisasinya sebesar Rp3,26 triliun. Anggaran belanja

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Pemprov Kalbar Raih Opini WTP

Sambungan dari Halaman 16

daerah sebesar Rp3,47 triliun dan realisasinya Rp3,30 triliun termasuk transfer bagi hasil ke kabupaten dan kota. Pembiayaan *netto* dianggarkan sebesar Rp162,04 miliar dan direalisasikan seluruhnya.

"Dengan jumlah pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp127,75 miliar," ungkap Didi.

Didi berharap LHP yang disampaikan dapat dimanfaatkan para pimpinan dan anggota dan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan untuk pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2015.

"Gubernur beserta jajarannya diharapkan segera menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," katanya.

Kepala Sub Auditorat Kalbar II, Joni Indra Putra mengatakan waktu 60 hari yang

diberikan bukan untuk menyelesaikan persoalan aset. "Waktu 60 hari itu bukan untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan selesai, minimal ada progresnya. Progresnya akan kami lihat. Karena (penyelesaian) persoalan aset ini apalagi tanah tidak bisa secepat itu," ungkapnya.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan opini WTP dengan paragraf penjelasan dari BPK merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD di Pemprov Kalbar untuk menyajikan anggaran keuangan dengan secara tepat, benar dan akuntabilitas. "Kami akan terus pertahankan status WTP. Mudah-mudahan akan terus bertahan di LHP tahun anggaran 2014 nantinya," katanya kepada wartawan. Menurut dia, Pemprov Kalbar sangat berhati-hati terkait penggunaan keuangan negara. Setiap SKPD selalu ditekankan untuk mengikuti aturan berlaku. "Makanya ketika ada anggaran yang rawan-rawan kami evaluasi. Kami juga tidak bisa jalan sendiri. Bahaya, ada resiko keuangan dan hukum yang harus ditanggung jika tidak berhati-hati memakai dana rakyat," ucapnya.

Pihaknya selalu mengedepankan pendekatan kepada SKPD. Tidak segampang seperti orang bicara terkait evaluasi keuangan. Oleh karenanya, Pemprov tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Tidak gampang. Makanya kami terus luruskan supaya status WTP tetap bertahan ke depannya," ujar dia. Untuk peningkatan APBD tahun 2015, Pemprov Kalbar akan terus menekankan peningkatan. Pihaknya akan memperjuangkan dan berupaya menggali semua potensi PAD secara maksimal termasuk potensi pendapatan lain. Tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan keuangan dan anggaran.

Sementara itu wakil rakyat di DPRD Kalimantan Barat mempertanyakan status opini WTP dengan Paragraf Penjelasan dari BPK RI. "Setahu saya status keuangan negara itu ada tiga yakni *disclaimer*, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian. Kok ada embel-embel di belakangnya. Mohon BPK bisa jelaskan itu," kata Retno Pramudya Ketua Komisi A ketika berbincang ringan kepada wartawan di gedung DPRD Kalbar. (*uni/den*)